

**SKRIPSI**  
**KEBIJAKAN LEGISLASI TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**JUDI BOLA ONLINE**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Bidang Hukum

Oleh:

Bangun Rudityo A

NIM. 0710113110



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2012



## LEMBAR PERSETUJUAN

### KEBIJAKAN LEGISLASI TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA ONLINE

Oleh :

**BANGUN RUDITYO A**

**NIM. 0710113110**

Disetujui pada tanggal : Oktober 2012

Pembimbing Utama

(Dr. Prija Djatmika, SH, MS.)  
NIP. 19611116 198601 1 001

Pembimbing Pendamping

(Bambang Sudjito, SH, M.Hum.)  
NIP. 19520605 198003 1 006

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Eny Harjati, SH, M.Hum.)  
NIP. 19590406 198601 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KEBIJAKAN LEGISLASI TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA**

**ONLINE**

**Oleh:**

**BANGUN RUDITYO A**

**0710113110**

Disahkan pada tanggal: Oktober 2012

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Prija Djatmika, SH.,M.S.)  
NIP. 19611116 198601 1 001

(Bambang Sudjito, SH. M.Hum.)  
NIP. 19520605 198003 1 006

Ketua Majelis

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Prija Djatmika, SH.,M.S.)  
NIP. 19611116 198601 1 001

(Eny Harjati, SH.,M.Hum.)  
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

(Dr. Sihabudin, S.H.,M.H.)  
NIP. 19591216 198503 1 001



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga Penulis bisa mencapai tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN LEGISLASI TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA ONLINE”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito selaku Rektor Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Ibu Eny Harjati selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
4. Bapak Prija Djatmika, SH. MS. Selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Bambang Sudjito, SH. M.Hum. Selaku dosen pembimbing pendamping yang telah sabar dan bersedia mengkorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini terselesaikan;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Staf Pengajar Fakultas Hukum, serta Staf PDIH atas segala bantuannya selama ini;
6. Bapak dan Ibu anggota Dit Reskrim Polda Jatim yang telah meluangkan waktu dan menerima penulis dengan tangan terbuka, serta memberikan keterangan-keterangan yang membantu dalam hal penyelesaian skripsi ini;

7. Ibu dan Bapak, Kakak, Mbak Siska, Naima, dan Adik yang telah memberikan bantuan moril dan materiil sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini;
8. Arindiah Citra Dewi A., S.E., S.Pd. yang dengan setia menemani dan memberi semangat dalam pengerjaan skripsi.
9. Teman-temanku, Ki Jagad Tomara, Yotha Aji, Andi Firmawan Sukur, Faris Nur HS, Firdaus, Adit, Kompas Guntur, Yongky Yudho P, dan A M Lubis yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, dorongan dan mengingatkan penulis untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
10. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2007 dan 2008, khususnya teman-teman Kosentrasi Hukum Pidana yang telah memberikan dukungan dan informasi seputar seputar skripsi.

Sulit untuk mencapai kesempurnaan, demikian juga dalam skripsi ini memang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi perbaikan yang lebih baik lagi bagi skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Malang, Oktober 2012

Penulis  
Bangun Rudityo A

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
 <b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Legislasi Sebagai Bagian Dari Kebijakan Kriminal.....	12
1. Istilah dan Pengertian Kebijakan Kriminal .....	12
2. Istilah dan Pengertian Kebijakan Legislasi .....	15
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....	18



1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian .....	30
1. Pengertian Judi .....	30
2. Motif Bermain Judi .....	31
3. Perjudian Dalam Perspektif Hukum.....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

a. Metode Pendekatan .....	34
b. Jenis dan Bahan Hukum .....	35
c. Teknik Analisa Data .....	36
d. Definisi Konseptual .....	37

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Tindak Pidana Judi Bola Online .....	38
1. Gambaran Umum .....	37
2. Modus Judi Bola Online .....	40
3. Motif Judi Bola Online .....	43
B. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Judi Bola Online.....	46
1. Ketentuan Dalam KUHP .....	49
2. Ketentuan Dalam UU ITE.....	63

C. Rumusan Norma Pidana Bagi Pelaku Judi Bola Online .....	67
1. Rumusan Norma Hukum Pada Ketentuan KUHP ....	69
2. Norma Hukum Terdapat Pada Ketentuan UU ITE .....	75
D. Perumusan Sanksi Pidana Pelaku Judi Bola Online .....	76
1. Rumusan Sanksi Pidana Dalam KUHP .....	79
2. Rumusan Sanksi Pidana Dalam UU ITE .....	87

## **BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	92

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	6
Tabel 4.1 .....	48



### ABSTRAKSI

Bangun Rudityo Adipitoyo, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2012, *Kebijakan Legislasi Terhadap Tindak Pidana Judi Bola Online*, Dr. Prija Djatmika, SH.,MS, Bambang Sudjito, SH.,MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang kebijakan legislasi terhadap tindak pidana judi bola online. Hal ini dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi akibat perkembangan jaman yang semakin pesat yang memunculkan kemudahan bagi umat manusia, namun di sisi lain kemajuan jaman juga membawa dampak negatif terhadap tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang pada awalnya hanya dapat dilakukan secara konvensional, maka pada saat ini sudah mulai menggunakan kemajuan teknologi. Munculnya kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi ternyata belum disadari masyarakat. Oleh karena itu saat ini banyak bermunculan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi dunia maya. Salah satunya adalah judi bola online dengan menggunakan internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum apa saja yang dapat menanggulangi judi bola online dan untuk mengetahui pemberian sanksi pidana bagi pelaku judi bola online.

Untuk membahas permasalahan mengenai judi bola online, penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* melalui teknik *statue approach* dengan metode analisis data secara *deskriptif kualitatif*. Bahan hukum primer berupa pertauran perundang-undangan meliputi KUHP, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literature, artikel, maupun situs internet.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa pelaku judi bola online dapat dijerat dengan ketentuan KUHP dan UU No. 11 tahun 2008. Sedangkan perumusan undang-undang pada ketentuan KUHP dan UU No. 11 tahun 2008 terdapat norma hukum dan norma kesusilaan, agama, dan kesopanan di masyarakat sebagai dasar munculnya undang-undang mengenai judi bola online. Rumusan sanksi pidana pada peraturan perundang-undangan yang memberantas judi bola online berupa sanksi penjara dan denda bagi pelaku judi bola online.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang dianugerahi akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pemikiran manusia senantiasa berkembang mengikuti pola perkembangan jaman. Dengan berkembangnya manusia, maka berkembang pula kebutuhannya. Karena pada dasarnya, keinginan manusia itu tidak terbatas, walaupun pada kenyataannya alat pemuas kebutuhannya terbatas. Oleh sebab itu, manusia dituntut untuk banyak melakukan berbagai terobosan dan inovasi untuk mencapai tingkat kepuasan maksimum dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Namun manusia selalu tidak pernah merasa puas. Melalui pengetahuannya, manusia selalu ingin terus melakukan inovasi yang lebih dan lebih jauh lagi. Hal inilah yang sering kita kenal sebagai perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi sejalan dengan perkembangan pengetahuan manusia. Dahulu, manusia hanya menggunakan peralatan seadanya dan sederhana untuk menunjang kehidupannya. Namun sekarang, peralatan-peralatan penunjang kehidupan manusia lebih canggih dan lebih kompleks. Teknologi merupakan salah satu ciri khusus kemuliaan manusia bahwa dirinya tidak hidup dengan makanan semata. Teknologi adalah sebuah manifestasi langsung dari bukti kecerdasan manusia.<sup>1</sup>

Globalisasi adalah gejala perkembangan yang sangat pesat di segala bidang, sehingga menyingkirkan batas geografis, ekonomi, dan budaya

---

<sup>1</sup>Aji Dedi Mulawarman, 2008, Pengertian Teknologi (online), <http://ajidedim.wordpress.com/teknologi-islami/technology/>, (diakses pada tanggal 3 Februari 2012).



masyarakat, sehingga batas-batas wilayah suatu negara menjadi bias. Dalam era globalisasi sekarang ini, teknologi merupakan kunci utama dalam arus perkembangan jaman. Bahkan ada suatu ungkapan populer yang menyatakan bahwa dengan menguasai teknologi, berarti sama dengan menguasai dunia.

Informasi dan teknologi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan dunia. Diciptakannya komputer dengan perkembangannya yang begitu pesat membawa kemudahan pada kehidupan manusia. Kemudian diciptakannya internet yang kemudian berkembang dengan sangat pesat membawa dampak positif bagi manusia. Ditambah lagi dengan semakin meluasnya penggunaan internet dalam kehidupan manusia, maka semakin bertambah cepat terjadinya pertukaran arus informasi dan teknologi dalam kehidupan manusia. Melalui media internet, kita dapat mengetahui kejadian yang penting terjadi, bahkan kejadian lima menit yang lalu yang terjadi di belahan bumi lainnya.

Keberadaan internet semakin memudahkan dan mempercepat arus perpindahan informasi teknologi yang sangat dibutuhkan manusia dalam era teknologi sekarang ini. Namun elemen penting dalam internet sesungguhnya adalah keberadaan penyelenggara jasa internet, atau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai *Internet Service Provider (ISP)*. ISP adalah perusahaan atau badan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan.<sup>2</sup>

Dengan gejala perkembangan teknologi di segala bidang yang semakin pesat, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perkembangan tindak

---

<sup>2</sup>Penyelenggara Jasa Internet (online),  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Penyelenggara\\_jasa\\_internet](http://id.wikipedia.org/wiki/Penyelenggara_jasa_internet), (diakses pada tanggal 3 Februari 2012).

kejahatan. Tindak kejahatan yang dilakukan tidak lagi menggunakan metode-metode konvensional. Namun digunakan metode-metode yang lebih canggih dan lebih efisien dalam melakukan tindak kejahatan. Hingga dikenalnya bentuk kejahatan dalam internet atau dunia maya yang seringkali disebut *Cyber Crime*, *cyber crime* merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*Cyber Space*) dan tindakan kejahatan dengan menggunakan komputer.<sup>3</sup>

*Cyber crime* sering diidentikkan dengan komputer *crime*, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tindak pidana komputer adalah setiap perbuatan melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangani, menyelidiki, dan menuntutnya.<sup>4</sup>

Widodo menyebutkan bahwa tindak pidana komputer merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.<sup>5</sup>

*Cyber crime* memiliki berbagai bentuk jenis modus, dan variasi. Bentuk *cyber crime* yang umum dan sering digunakan antara lain: *carding*, *hacking*, *cracking*, *defacting*, *spamming*, *malware*, *phising*, dan perjudian yang dilakukan secara online. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencari data di

---

<sup>3</sup> Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 7

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 40

<sup>5</sup> Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hal 4.



internet. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain.

*Cracking* adalah *hacking* untuk tujuan jahat. *Defacting* adalah kegiatan mengubah halaman situs/website pihak lain. Spamming adalah pengiriman berita atau iklan melalui surat elektronik (e-mail) yang tak dikehendaki. Malware adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system.<sup>6</sup>

*Phising* adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet (*user*) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (*username*) dan kata sandinya (*password*) pada suatu halaman web yang tampilannya sudah diatur sedemikian rupa sehingga mirip, bahkan sama persis dengan tampilan web aslinya. Kejahatan ini sebenarnya hanya memanfaatkan kelengahan dan kelalaian user dalam memasukkan alamat web yang dituju.

Perjudian secara online pada dasarnya sama dengan perjudian pada umumnya, hanya saja judi bola online menggunakan komputer dalam melakukan permainan judi. Main judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Andrik Supriadi, 2010, *Hati-Hati Kejahatan Internet (online)*, <http://andriksupriadi.wordpress.com/2010/04/29/cyber-crime/>, (7 Februari 2012).

<sup>7</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, 2009, hal 112



Kasus perjudian yang paling banyak dilakukan secara online adalah judi bola online. Kasus judi bola online yang paling baru adalah yang terjadi di Jakarta dan telah ditangkap pada tanggal 29 Februari 2012, cukup mengagetkan masyarakat karena selain menangkap 6 orang pelaku judi bola online polisi menyatakan bahwa anggota pemain judi bola online yang sudah berjalan selama dua tahun tersebut berjumlah 22.000.000 anggota. Judi bola online tersebut dapat dinikmati oleh para anggota dalam situs [www.kakadewa.com](http://www.kakadewa.com). Selain itu para pelaku judi bola online juga secara terang-terangan mengiklankan dalam [www.google.com](http://www.google.com) dan [www.i-comers.com](http://www.i-comers.com). Pihak kepolisian juga mencatat bahwa omset judi bola online setiap bulan dapat mencapai puluhan miliar.<sup>8</sup>

Judi bola online mempunyai modus yang berbeda dengan permainan judi konvensional. Pada judi konvensional pihak yang bermain judi akan saling bertemu atau bertatap muka untuk melakukan permainan judi, tetapi pada judi bola online para pemain tidak perlu untuk saling bertemu untuk memainkan judi bola online. Karena masing-masing pihak yang bermain judi bola terhubung dengan internet, sehingga permainan judi bola online tetap dapat dimainkan meski pihak yang bermain berdomisili di tempat yang berbeda. Bahkan judi bola online bisa dimainkan antar provinsi di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Diringkus Pelaku Judi Bola Online, 2012, [www.metro.news.viva.co.id](http://www.metro.news.viva.co.id), (diakses pada tanggal 4 September 2012)

Sementara itu berdasarkan data ungkap kasus perjudian Polda Jatim pada tahun 2010-2011

**Tabel 1.1**

**Data Ungkap Kasus Perjudian Polda Jatim 2010-2012**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Jumlah Tersangka</b>
2010	2	2
2011	1	1
2012	9	10

*Sumber: Data Sekunder diolah, 2012*

Berdasarkan tabel data ungkap kasus perjudian bola online Polda Jatim tahun 2010 sampai dengan 2012 dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 Polda Jatim telah mengungkap 2 kasus perjudian online dengan jumlah tersangka sebanyak 2 orang. Sedangkan pada tahun 2011 terjadi penurunan dalam pengungkapan kasus judi bola online yakni sebanyak 1 kasus dengan jumlah tersangka 1 orang. Pada tahun 2012 Polda Jatim mengungkap 9 kasus dengan jumlah tersangka 10 orang.

Melihat jumlah kasus diatas, terlihat adanya peningkatan kasus perjudian bola online, hal ini terlihat dengan meningkatnya jumlah kasus judi bola online. Meningkatnya judi bola online, karena pelaku menganggap bermain judi secara online akan lebih aman dari pada bermain judi secara konvensional.

Judi bola online merupakan bentuk pergeseran dari kejahatan konvensional beralih kepada kejahatan modern, karena akibat dari kemajuan informasi dan teknologi. Kepolisian menjerat para pelaku judi bola online dengan pasal 303 KUHP dan UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Pejudian. Namun

menjerat para pelaku judi bola online dengan pasal 303 KUHP dan UU No. 7 tahun 1974 belum dapat menanggulangi keberadaan judi bola online, karena menurut ketentuan KUHP pelaku hanya diancam pada perbuatan judi saja, sedangkan perbuatan kejahatan terhadap komputer tidak dikenai sanksi. Kemudahan orang untuk mengakses situs judi di internet juga merupakan factor sulitnya judi bola online diberantas, sebagai contoh apabila seseorang ingin bermain judi bola online maka tinggal membuka website judi bola online yang ada di internet. Mudahnya seseorang membuka website judi bola online di sebabkan lemahnya peran aparat penegak hukum dan pemerintah. Pemerintah telah memberlakukan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang di dalamnya juga mengatur mengenai larang perjudian yaitu di dalam pasal 27 ayat (2). Namun tidak adanya kebijakan dari pemerintah mengenai keberadaan website judi bola online merupakan faktor penyebab sulitnya judi bola online diberantas.

Era globalisasi dan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang menggunakan modus baru. Judi bola online merupakan bentuk dari cyber crime yang semakin banyak terjadi pada saat ini. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan aparat penegak hukum dan pemerintah terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini diperparah dengan minimnya aturan hukum kebijakan pengaturan hukum pidana dalam menanggulangi judi bola online.

Untuk itu, perlu adanya penanggulangan secara cepat dan akurat. Atas pertimbangan inilah, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah



## KEBIJAKAN LEGISLASI TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI BOLA ONLINE.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka inti permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang judi bola online pada saat ini?
2. Bagaimana rumusan norma terhadap tindak pidana judi bola online?
3. Bagaimana rumusan saknsi pidana terhadap tindak pidana judi bola online?

### C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum apa saja dalam hukum positif Indonesia dalam penanggulangan judi bola online.
2. Untuk mengetahui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana judi bola online.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan kebijakan legislasi dalam penanggulangan judi bola online.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan mengenai kebijakan legislasi dalam pemberantasan judi bola online.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai masukan dan kontribusi bagi aparat penegak hukum agar dapat memberantas judi bola online.

- c. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wacana pengetahuan kepada masyarakat dan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai bahaya judi bola online.

### **E. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka dalam bagian ini akan diberikan gambaran singkat, jelas dan terarah mengenai penulisan skripsi yang telah terbagi dalam:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai kebijakan legislasi, tinjauan mengenai tindak pidana, serta tinjauan mengenai judi bola online.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis membahas mengenai jenis metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, jenis dan sumber data di dapat dan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, metode penelusuran bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi konseptual.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat uraian sekaligus merupakan analisis terhadap penelitian yang dilakukan meliputi kategori kebijakan legislasi



terhadap pemberantasan judi bola online dan kendala yang dihadapi dalam pemberantasan judi bola online.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Legislasi Sebagai Bagian Dari Kebijakan Kriminal

##### 1. Istilah dan Pengertian Kebijakan Kriminal

Prof. Sudarto, S.H., pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :<sup>9</sup>

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa kebijakan criminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Kebijakan kriminal terbagi menjadi dua yaitu : 1) Kebijakan Penal, dan 2) Kebijakan Non Penal. Kebijakan penal dapat disebut juga kebijakan hukum pidana, yang

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 3

mempunyai pengertian suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, adalah :<sup>10</sup>

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertian dari Prof. Sudarto, bahwa melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari kebijakan hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.

---

<sup>10</sup> Ibid, hal 26



Menurut A. Mulder, *Strafrechtspolitiek* ialah garis kebijakan untuk menentukan :<sup>11</sup>

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana juga merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa yang akan datang.<sup>12</sup> Dari penjelasan tersebut tampak bahwa kebijakan hukum pidana terkait dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana, namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana dalam arti yang sempit. Karena hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri budaya (*culture*), struktur, dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Maka pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana, tetapi juga memperbaharui sektor-sektor lain

---

<sup>11</sup> Ibid, hal 27

<sup>12</sup> AI. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, hal 11

seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.<sup>13</sup>

Kebijakan hukum pidana memiliki ruang lingkup yang luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap yang terdiri dari :<sup>14</sup>

- a. Kebijakan formulasi/legislasi, yaitu tahap perumusan dan penyusunan hukum pidana.
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.
- c. Kebijakan Administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

## 2. Istilah dan Pengertian Kebijakan Legislasi

Legislasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *legislation*. Dalam khasanah ilmu hukum legislasi mengandung makna dikotomis yang berarti (1) proses pembentukan hukum, dan juga bisa berarti (2) produk hukum. Namun, berdasarkan pembacaan dan penelusuran berbagai kamus, ternyata memberi pengertian yang berbeda mengenai legislasi.

Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, misalnya yang mengartikan legislasi sebagai (1) perundang-undangan, dan (2) pembuatan undang-undang. Hal ini berbeda dengan Subekti dan Tjitrosoedibio yang menyamakan legislasi dengan perundang-undangan saja. Sedangkan

---

<sup>13</sup> Ibid, hal 12

<sup>14</sup> Ibid, hal 14

pengertian yang berbeda diutarakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyamakan legislasi sebagai pembuatan undang-undang.<sup>15</sup>

Dari sekian banyak pengertian tentang legislasi tersebut, dapat dibuat kesimpulan bahwa pengertian legislasi sebagai proses pembuatan hukum dalam merangka melahirkan hukum positif (dalam arti hukum perundang-undangan/peraturan perundang-undangan). Legislasi dimulai dari tahap perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum.<sup>16</sup>

Sarana untuk mengatur kehidupan berasama manusia (masyarakat) tidak hanya dilakukan oleh hukum saja. Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa terdapat cara-cara nonhukum, seperti kontrol sosial informal, yang sering menunjukkan prestasi lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh hukum. Dalam kaitannya fungsionalisasi hukum dalam kehidupan manusia tersebut, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas berbeda-beda. Secara garis besar proses itu terdiri atas (1) pembentukan hukum (*legislasi/law making process*), dan (2) penegakan hukum (*law enforcement*). Pembentukan hukum merupakan awal dari sekalian proses pengaturan masyarakat tersebut. Pembentukan

---

<sup>15</sup> Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi*, In-TRANS Publishing, Malang, 2008, hal 88

<sup>16</sup> Ibid, hal 90



hukum merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum.<sup>17</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut dapat diketengahkan bahwa proses pembentukan hukum (legislasi) merupakan proses yang relatif sangat penting sebagaimana relatif pentingnya melihat proses implementasi dan *enforcement* dari hukum itu sendiri. Sebab, proses-proses yang terjadi dalam pembentukan hukum bagaimana pun juga akan ikut mempengaruhi proses implementasi dan penegakan hukum. Kekeliruan dalam proses pembentukan hukum yang keliru tersebut bisa melahirkan produk hukum yang bersifat kriminogen dalam pergaulan bersama masyarakat.

Fungsi pembentukan hukum (peraturan perundang-undangan) untuk saat ini semakin terasa penting dan sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan dalam negara yang berdasar atas hukum modern (*verzorgingsstaat*) tujuan utama legislasi bukan sekedar menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, namun tujuannya lebih luas dari itu yaitu untuk menciptakan modifikasi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif ilmu hukum, proses pembentukan hukum (legislasi) dari suatu Negara tidak bisa dilepaskan dari “cara berhukum” bangsa yang bersangkutan. Menurut Satjipto Rahardjo, “cara berhukum” suatu bangsa menunjukkan bahwa bangsa-bangsa itu memiliki semacam hak untuk menempuh jalannya sendiri dalam berhukum atau *rule of law*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid, hal 91

<sup>18</sup> Ibid, hal 104

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa inti legislasi terdiri atas dua golongan besar, yaitu tahap sosiologis (sosio-politis) dan tahap yuridis. Dalam tahap sosiologis berlangsung proses-proses untuk mematangkan suatu masalah yang selanjutnya akan dibawa ke dalam agenda yuridis. Dalam tahap sosio-politis, gagasan awal bahwa suatu hal perlu diatur dalam hukum diolah oleh masyarakat sendiri, dibicarakan, dikritik, dipertahankan, melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Pada tahap ini suatu gagasan mengalami ujian, apakah akan dilanjutkan dengan diformat secara hukum atau berhenti di tengah jalan.<sup>19</sup>

Apabila gagasan itu secara politis berhasil diteruskan, maka tentu bentuk dan isinya mengalami perubahan, yakni makin dipertajam (*articulated*) disbanding pada saat ia muncul. Pada titik ini, akan dilanjutkan ke dalam tahap yuridis yang merupakan pekerjaan yang benar-benar menyangkut perumusan atau pengkaidahan suatu peraturan hukum.<sup>20</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar*

---

<sup>19</sup> Ibid, hal 110

<sup>20</sup> Ibid, hal 112

*feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.<sup>21</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Th. 1999).
- b. Peristiwa Pidana. Digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*. Mr. Drs. H.J. Van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam bukunya *Hukum Pidana*. Istilah peristiwa pidana juga digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1).
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H, Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 67.

<sup>22</sup> Ibid, hal 67-68



*Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.<sup>23</sup>

- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3).
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai bukunya, misalnya *Asas-asas Hukum Pidana*.

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara harfiah, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum.

Dalam mengartikan *strafbaar feit*, banyak pendapat dari para ahli yang mengartikan dari *strafbaar feit*. Banyaknya pendapat dari para ahli karena adanya perbedaan dari para ahli hukum yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan, dan adanya pendapat dari ahli hukum yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Pandangan yang

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 68

memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan disebut pandangan dualisme. Sedangkan pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya disebut pandangan monisme. Penganut pandangan dualisme antara lain Pompe, Vos, R. Tresna, Roeslan Saleh, dan lain-lain.<sup>24</sup> Sedangkan penganut pandangan monisme antara lain JE Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J. van Schravendijk, dan lain-lain.<sup>25</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>26</sup>

### a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoretisi

Unsur tindak pidana menurut sudut pandang teoretis adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuat oleh ahli hukum. Vos misalnya, mendefinisikan tindak pidana sebagai *“kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang undangan”*. Sehingga dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa unsur tindak pidana menurut Vos adalah:

- 1) Kelakuan manusia
- 2) Diancam dengan pidana

---

<sup>24</sup> Ibid, hal 72

<sup>25</sup> Ibid, hal 75

<sup>26</sup> Ibid, hal 79

3) Dalam peraturan perundang-undangan

Schravendijk mendefinisikan tindak pidana sebagai *“kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”*. Dari uraian tersebut dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana menurut Schravendijk, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Kelakuan
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam dengan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan

Perbedaan perumusan dari para ahli didasarkan pada pola pemikiran tentang adanya pemisahan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan (dualisme) ataupun tidak dilakukan pemisahan (monisme). Bagi Vos yang menganut aliran dualisme, tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Sedangkan bagi Schravendijk yang menganut aliran monisme,

---

<sup>27</sup> Ibid, hal 81



tidak memisahkan antara unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.<sup>28</sup>

b. Unsur tindak pidana menurut Undang-undang

KUHP utamanya buku II memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana, yaitu:<sup>29</sup>

1) Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana termasuk dalam tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*), juga dapat disebut sebagai perbuatan materiil (*materiel fiet*) dan tingkah laku pasif atau negatif.

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya mengambil. Sementara tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan (*nalaten*), yaitu suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam

---

<sup>28</sup> Ibid, hal 79

<sup>29</sup> Ibid, hal 83-115

keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Contoh perbuatan pasif adalah membiarkan, tidak memberikan pertolongan, dan sebagainya.

## 2) Unsur melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam aturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam aturan perundang-undangan.

Berpegang pada prinsip ini, setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dengan mencantulkannya dalam peraturan perundang-undangan, tanpa melihat apakah unsur melawan hukum itu dicantumkan ataukah tidak dalam rumusan, maka rumusan tindak pidana itu sudah mempunyai sifat melawan hukum. Artinya melawan hukum adalah unsur mutlak dari tindak pidana.

### 3) Unsur kesalahan

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan pada orang itu. Dengan demikian, terhadap pelaku tadi dijatuhi pidana.

### 4) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*materiel delicten*); (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana. Timbulnya akibat itu bukan untuk memberatkan pertanggungjawaban pidana, tetapi menjadi syarat selesainya tindak pidana.

### 5) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana



perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

- a. Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan.
- b. Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan.
- c. Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana.
- d. Unsur keadaan keadaan yang menyertai mengenai subjek tindak pidana.
- e. Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.
- f. Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada perbuatan dari yang berhak mengadu.

Untuk dapat dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak tersebut. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini. Misalnya pada penganiayaan berat (pasal 354 KUHP), kejahatan ini dapat terjadi walaupun akibat luka berat tidak terjadi. Luka berat hanyalah sekedar syarat saja untuk dapat diperberatnya pidana.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dituntut. Sifat melawan hukumnya dan patutnya dipidana perbuatan itu sepenuhnya digantungkan pada timbulnya unsur ini. Nilai bahayanya bagi kepentingan hukum dari perbuatan itu terletak pada timbulnya unsur syarat tambahan, bukan semata-mata pada perbuatan.

9) Unsur objek hukum tindak pidana

Tindak pidana selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan. Unsur ini terkait dengan unsur objek tindak pidana. Keduanya menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan menjadi unsur esensial atau mutlak tindak pidana. Karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana.

Unsur obyek hukum seringkali diletakkan di belakang / sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang pada pembunuhan (pasal 338 KUHP). Menghilangkan merupakan unsur perbuatan, dan nyawa orang lain adalah unsur obyek tindak pidana. Unsur mengenai objek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana.

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang. Tetapi ada beberapa tindak pidana dirumuskan dengan tujuan hanya diberlakukan pada orang tertentu saja. Dalam rumusannya disebutkan secara tegas kepada siapa norma hukum tindak pidana diberlakukan. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan.



#### 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur tambahan yang bersifat objektif dan unsur tambahan yang bersifat subjektif.

Bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai atau harga objek kejahatan secara ekonomis. Sedangkan bersifat subjektif, artinya faktor yang meringankan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, misalnya ketidaksengajaan atau culpa.

Berdasarkan unsur-unsur yang tersebut di atas, maka apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi orang yang terbukti akan dapat dikenakan sanksi pidana. Pada hukum pidana penjatuhan sanksi pidana diatur pada teori pemidanaan, pemidanaan adalah teori yang menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Menurut Hoefnagels bahwa pemberian sanksi pidana merupakan suatu proses pembangkitan semangat dan pencelaan untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku. Ada pendapat mengenai teori pemidanaan ini, yang membagi menjadi tiga golongan besar yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan.
2. Teori relatif atau teori tujuan.
3. Teori gabungan.

## C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

### 1. Pengertian Judi

Judi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Pemain yang memenangkan pertaruhan tersebut akan mendapat uang, dan yang kalah maka akan membayar uang. Besar uang yang dijadikan taruhan telah disepakati sebelum permainan judi dimainkan.<sup>30</sup>

Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, karena perjudian mempunyai konsekuensi social yang kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Beberapa negara-negara islam melarang perjudian, hamper semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum Negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang. Macam perjudian di Indonesia:

- a. Judi togel
- b. Judi sabung ayam

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hal

- c. SDSB
- d. Judi Pakong
- e. Judi bola
- f. Judi kartu

## 2. Motif Bermain Judi

Para pemain judi mempunyai alasan sendiri mengapa mereka memilih memainkan judi tanpa takut resiko untuk ditangkap aparat kepolisian. Alasan pelaku bermain judi adalah :<sup>31</sup>

### a. Ekonomi

Motif ekonomi sering dijadikan alasan yang paling sering dikatakan oleh para pelaku judi yang tertangkap oleh aparat kepolisian. Para pelaku beralasan mereka kekurangan secara ekonomi dan membutuhkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga mereka menjadikan permainan judi untuk mendapatkan tambahan.

### b. Kebiasaan

Pada saat ini judi dianggap permainan yang biasa di masyarakat. Para pemain judi asering bermain di depan umum baik secara diam-diam dengan beralasan hanya bermain kartu biasa atau yang dilakukan secara terang-terangan dengan menggunakan uang.

## 3. Perjudian Dalam Perspektif Hukum

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum,

<sup>31</sup> [www.situsjudionline.net/alasan-tepat-bermain-judi-online](http://www.situsjudionline.net/alasan-tepat-bermain-judi-online), (diakses tanggal 29 Agustus 2012)



serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

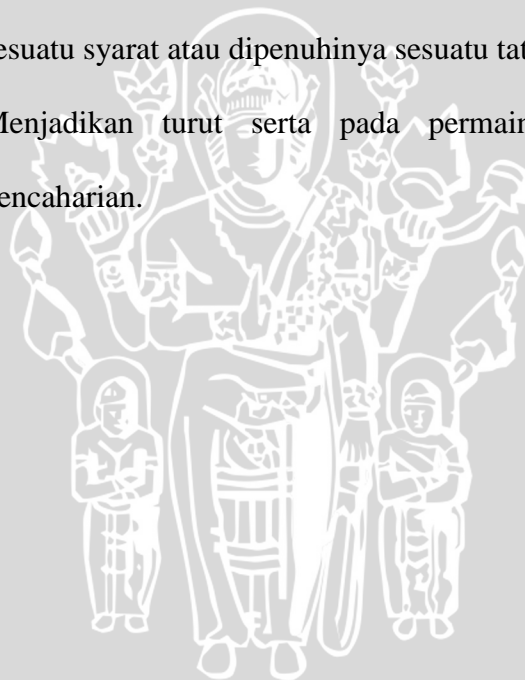
Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa

mendapat izin :

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang tepat dapat memperlancar proses penelitian dan hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*. penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>32</sup>

Dipilihnya metode penelitian *yuridis normatif* dilatar belakangi oleh sasaran penelitian, yaitu analisis kebijakan hukum pidana, dalam hal ini kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana judi bola online. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan metode dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007, hal 295.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 302



## B. Jenis dan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga jenis atau tiga macam data, yaitu:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas literatur mengenai kebijakan hukum pidana, serta peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) / Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda).<sup>34</sup> Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 303 dan 303 bis.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang ditulis atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>35</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- a) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 295

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 296

- b) Literatur berupa buku-buku yang berisi teori-teori dan pendapat ahli hukum
- c) Karya tulis dalam bentuk jurnal hukum, skripsi dan laporan penelitian yang relevan dengan tema penelitian
- d) Artikel dalam jurnal hukum di internet

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.<sup>36</sup> Bahan hukum tersier antara lain:

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

### C. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif maksudnya penganalisisan data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum diolah dan disusun secara sistematis dan diuraikan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang obyek penelitian. Kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dipisah-pisahkan, diambil yang memiliki relevansi dengan permasalahan untuk kemudian dikaji lebih lanjut dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>36</sup> Ibid, hal 290

#### D. Definisi Konseptual

1. Kebijakan Legislasi adalah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sering juga kebijakan legislasi disebut dengan istilah “kebijakan formulatif”.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
3. Judi bola online adalah suatu bentuk tindak pidana perjudian dengan menggunakan media internet dimana pemain yang bertaruh menebak siapa pemenang dalam pertandingan sepak bola.





## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tindak Pidana Judi Bola Online**

##### **1. Gambaran Umum**

Judi bola online adalah suatu bentuk tindak pidana perjudian dengan menggunakan media internet dimana pemain yang bertaruh menebak siapa pemenang dalam pertandingan sepak bola. Pemain yang memenangkan pertaruhan tersebut akan mendapatkan uang sesuai dengan besaran yang dipertaruhkan.

Praktek judi bola online berbeda dengan judi bola secara konvensional karena pada judi bola online para pelaku tidak harus datang atau bertemu untuk membuat kesepakatan mengenai taruhan yang akan dimainkan, sehingga judi bola online memungkinkan dilakukan dalam jarak yang sangat berjauhan. Hal ini dikarenakan pada judi bola online menggunakan fasilitas internet dalam bermain judi. Dalam dunia internet, yang kini sudah memasyarakat, bisa ditemui pula situs judi bola. Dengan begitu para penjudi tidak perlu bertemu untuk bermain judi bola. Mereka cukup menyiapkan seperangkat komputer atau software di rumah atau di tempat kerja. Dengan perangkat berteknologi canggih itu, mereka dapat dengan mudah mengakses ke situs judi bola online, dan kemudian melakukan permainan judi bola sebagaimana yang dilakukan di dunia nyata.

Pada saat ini ada tiga negara besar di dunia yang menentang keberadaan judi bola online maupun bentuk perjudian lain yang juga terdapat di internet. Negara besar tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada dan Inggris, negara-negara tersebut berpendapat bahwa judi akan merusak moral suatu bangsa, khususnya terhadap anak-anak di bawah umur. Perlu diketahui juga bahwa perjudian di internet tidak mengenal batas umur, wilayah dan status sosial seseorang. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat menjelajahi *website* judi dan ikut bermain dalam suatu taruhan. Sepanjang ia dapat mengantongi kartu kredit yang dapat diverifikasi, maka taruhan tersebut sulit untuk dielakkan. Hal inilah yang sangat mengkhawatirkan. Sebab, anak-anak dapat bertindak diluar hukum. Mereka akan terdorong untuk mencuri kartu kredit orang tua atau mereka juga dapat berbohong kepada orang tua agar diberikan kartu kredit. Akibatnya, orang tua sangat dirugikan, sementara moral anaka-anak menjadi rusak.

Hal lain yang juga harus diwaspadai oleh pemain judi online yang bersifat amatir. Penyelenggara judi itu dapat berbuat curang dan tidak bertanggung jawab. Sebab, sewaktu-waktu dia dapat mengakhiri perjudian secara *hit and run*. Penyelenggara tersebut secara tiba-tiba mengakhiri permainan judi ketika pemain tersebut telah mentransferkan sejumlah uang. Akibatnya, yang mengakses bisa rugi besar, karena telah tertipu oleh penyelenggara.

Di Indonesia ada beberapa situs-situs yang menyediakan permainan judi bola online, yang paling menggegerkan di Indonesia adalah

penggerebekan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 29 Februari 2012 di Jalan Jatiraya No. 72, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta. Dalam penggerebekan tersebut polisi berhasil menangkap 6 orang pelaku judi bola online dimana para tersangka tersebut adalah pengelola judi bola online. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto website yang menyediakan layanan permainan judi bola online adalah [www.kakakdewa.com](http://www.kakakdewa.com) yang mempunyai 22 orang member yang tersebar di berbagai daerah. Dalam judi bola online tersebut pengelola dapat menerima omzet sebesar Rp 400.000.000 per hari.<sup>37</sup>

## **2. Modus Tindak Pidana Judi Bola Online**

Tindak pidana judi bola online mempunyai modus yang sangat canggih dalam melakukan permainan judi bola online, para pemain judi bola online pada awalnya hanya bermain melalui internet, tetapi seiring berkembangnya waktu dan mulai terciumnya modus permainan judi bola online oleh polisi. Para pemain judi bola online sekarang mulai bermain secara berkelompok saja, sehingga permainan judi bola online hanya dapat dimainkan yang sudah bergabung dengan kelompok tersebut. Modus baru yang dilakukan oleh para pemain judi bola online ini meyulitkan pihak kepolisian untuk memberantas para pelaku karena polisi sulit menembus kelompok tersebut, karena kelompok tersebut menggunakan sandi yang hanya diketahui oleh kelompok tersebut.

---

<sup>37</sup> Diringkus Pelaku Judi Bola Online, 2012, [www.metro.news.viva.co.id](http://www.metro.news.viva.co.id), (diakses pada tanggal 4 September 2012)



Adapun permainan judi bola online dilakukan melalui website yang menyediakan judi bola online, ada beberapa website yang menyediakan layanan judi bola online maupun permainan judi yang lainnya. seperti, [www.sbobet.com](http://www.sbobet.com), [www.kakadewa.com](http://www.kakadewa.com) dan [www.boladewa.com](http://www.boladewa.com).

Ada beberapa tahapan cara yang dilakukan oleh para pelaku judi bola online yang hendak bermain judi bola online yaitu:<sup>38</sup>

a) Melakukan Registrasi

Pada tahap awal ini pemain harus melakukan registrasi atau dengan kata lain pemain yang hendak bergabung untuk bermain judi bola online adalah dengan mendaftarkan kepada website yang menyediakan layanan permainan judi.

b) Melakukan Daftar Game

Setelah melakukan registrasi pemain akan mendapatkan ID (*Indentity*), dimana ID tersebut digunakan oleh pemain judi untuk masuk ke dalam website yang menyediakan layanan permainan judi. Selain mendapatkan ID pemain yang sudah mendaftar juga akan mendapatkan *password* yang secara khusus hanya dimiliki oleh orang yang telah terdaftar di website judi. *Password* tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan Bandar yang mengendalikan hal ini digunakan agar password tersebut sulit di lacak dan di khawatirkan diketahui oleh pihak kepolisian.

---

<sup>38</sup> [www.sbobet.com](http://www.sbobet.com), cara bermain judi bola online, (diakses pada tanggal 22 Agustus 2012)

c) Menentukan Permainan Judi

Setelah mendapatkan ID dan password pemain yang telah mendaftar akan dapat memasuki website judi. Pada website judi tersebut pemain akan menemukan banyak pilihan permainan judi seperti poker, judi bola, judi togel, dan bola tangkas.

d) Deposit Uang Kepada Bank

Walaupun mendapatkan *ID* dan *password* maupun telah dapat memasuki website judi, seseorang tidak akan dapat memainkan permainan judi sebelum menandatangani sejumlah uang kepada Bandar judi tersebut. Mendepositkan sejumlah uang merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin bermain judi, jumlah uang yang harus didepositkan beragam tetapi biasanya Bandar judi mewajibkan pemain menandatangani uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Uang yang telah didepositkan tersebut tidak dapat diambil, dan secara otomatis apabila pemain yang bersangkutan memenangkan perjudian, maka uang yang ada direkening akan bertambah, dan apabila pemain tersebut kalah maka uang akan berkurang dengan sendirinya. Apabila uang yang ada dalam rekening tersebut habis maka pemain tersebut tidak dapat bermain lagi dan jika ingin melanjutkan permainan judi tersebut maka pemain tersebut harus menandatangani kembali uang kepada Bandar judi.

Setelah semua tahapan diatas telah dilakukan oleh pemain maka pemain tersebut dapat langsung memainkan judi bola. Mudah-mudahan para

pemain mengakses dan mendaftarkan judi bola online menyebabkan judi bola online menjadi banyak dilakukan oleh seseorang.

### 3. Motif para Pemain Judi

Pemain judi bola online maupun perjudian yang lain pada umumnya mempunyai alasan tersendiri mengapa memilih perjudian untuk mendapatkan uang daripada harus bersusah payah bekerja untuk mendapatkan uang. Secara umum orang menyenangi perjudian disebabkan oleh beberapa hal yaitu:<sup>39</sup>

#### a) Tersedia banyak pilihan

Pada permainan judi bola online pemain akan mendapatkan beragam pilihan permainan judi. Sehingga ketika pemain sudah jenuh dengan salah satu permainan judi, maka dia dapat berganti dengan permainan judi yang lain, tanpa harus merubah ID atau password.

#### b) Mudah dalam memainkan judi

Permainan judi online sangat mudah untuk dimainkan tanpa perlu bersusah payah pergi ke tempat permainan judi para pelaku judi bola online dapat dengan mudah memainkan judi online di rumah ataupun di suatu tempat, asalkan pemain dapat menggunakan komputer. Mudahnya permainan judi bola online juga didukung dengan banyaknya bonus yang di berikan oleh agen judi online

<sup>39</sup> www.sbobet.com, alasan memilih judi bola online, (diakses pada tanggal 23 Agustus 2012)



kepada pemain judi online, sehingga akan menambah banyak pemain judi online.

c) Keamanan dalam bermain judi

Keamanan dalam bermain judi menjadi alasan yang paling sederhana bagi para pemain judi bola online, hal ini dikarenakan pada permainan judi bola online pemain sulit terdeteksi oleh kepolisian. Ketatnya keamanan yang diberlakukan oleh para pemain judi bola membuat pihak kepolisian akan kesulitan mendeteksi jaringan judi bola online. Sehingga bermain judi melalui dunia maya saat ini dijadikan pilihan bagi para pelaku judi bola online.

d) Tidak adanya gangguan dari pihak lawan

Permainan judi bola online dapat dimainkan sesama pemain yang sangat berjauhan, ada sedikit keuntungan apabila permainan judi bola online dilakukan secara berjauhan, karena pemain akan dapat memprediksi secara matang taruhan yang akan dipasang untuk permainan judi bola online, selain itu para pemain yang bersangkutan tidak perlu banyak berdebat mengenai taruhan yang akan dipasangkan karena semua sudah diatur oleh agen judi bola online dan para pemain sudah mengetahui resiko dari taruhan yang dipasang.

e) Kemudahan dari agen kepada pemain judi pemula

Kemudahan yang diberikan oleh agen kepada pemain judi bola online yang masih pemula merupakan salah satu cara yang

dilakukan oleh agen agar mendapatkan pemain secara banyak karena dengan banyak pemain yang mendaftar maka akan banyak keuntungan yang di dapatka oleh agen. Kemudahan yang diberikan salah satunya adalah dengan memberikan panduan secara lengkap dan apabila kesulitan maka pemain dapat menghubungi agen tetapi tentu saja orang yang menghubungi sudah terdaftar sebagai anggota judi bola online dan komunikasi hanya melalui email atau Hp tanpa bertemu secara langsung.

f) Tidak perlu membawa uang yang banyak

Permainan judi bola online tidak mengharuskan pemain membawa uang yang banyak ketika bermain judi, hal ini berbeda dengan permainan judi yang lainnya seperti judi remi, togel, cap sai, sabung ayam yang mengharuskan pemain membawa uang ketika akan bertanding. Sehingga para pemain judi bola online cukup menyimpan uang dalam rekenig bank yang nantinya secara otomatis apabila menang atau kalah akan bertambah atau berkurang. Namun apabila uang dalam rekening telah habis pemain harus mengisi uang ke dalam rekening jika ingin bermain.

g) Dapat dimainkan berbagai kalangan

Judi bola online dapat dimainkan oleh siapa saja tanpa memandang status sosial pemain maupun latar belakang ekonomi. Ini karena sifat dari agen judi bola yang terbuka terhadap siapa saja asalkan pemain tersebut mengerti mengenai teknologi dan sanggup

meyepakati perjanjian yang dibuat maka siapa saja dapat memainkannya.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Judi Bola Online**

Perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda. Dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* yang dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang, istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara, sedangkan istilah *gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.

Pengertian *wetgeving* dalam *juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- 2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal 10

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 11



- 1) Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- 2) Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau tatanan.
- 3) Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum, abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dirumuskan tentang pengertian tersebut sebagai berikut:

- 1) Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
- 2) Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Judi bola online merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Meskipun hampir sama dengan judi bola konvensional tetapi judi bola online mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dari pada judi bola konvensional.

Pada judi bola konvensional para pelaku judi hanya dikenakan hukuman berjudi saja, tetapi pada judi bola online para pelaku judi juga dapat dikenakan perbuatan

kejahatan terhadap komputer, karena para pelaku judi bola online menggunakan media komputer untuk bermain judi.

Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan judi merupakan bentuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan biasa diatur dalam 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2) selain di atur dalam KUHP pelarangan judi judi juga di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan 3) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Tetapi dengan bentuk kejahatan yang menggunakan media komputer, dan berkembangnya modus perjudian melalui dunia maya maka sudah seharusnya aparat penegak hukum membedakan antar perjudian secara konvensional dengan perjudian melalui media komputer. Karena dengan modus kejahatannya yang menggunakan komputer, maka aturan yang dipakai seharusnya juga bukan hanya ketentuan dari KUHP, dan undang-undang nomor 7 tahun 1974 melainkan, ketentuan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, Kepolisian dalam menindak kasus tindak pidana dunia maya ternyata tidak serta merta menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan meninggalkan KUHP begitu saja. Namun, pada kenyataannya sering terjadi dalam menjerat pelaku judi bola online penegak hukum hanya menggunakan ketentuan KUHP, dan uu no. 7 tahun 1974. Hal ini merupakan keuntungan bagi pelaku judi bola online karena terdapat perbedaan antara ketentuan di dalam KUHP dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2004 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Tabel 4.1

Peraturan Yang Digunakan Pada Pemberantasan Judi Bola Online Dalam  
KUHP dan UU ITE

No.	Perbuatan	KUHP	UU ITE
1.	Judi Bola Online	Pasal 303 dan Pasal 303 Bis	Pasal 27 ayat (2)

Sumber : Data Sekunder diolah, 2012

### 1. Ketentuan Dalam KUHP

Judi bola online merupakan bentuk kejahatan yang di dalam KUHP diatur pada buku ke-2 yang mengatur tentang kejahatan. Bentuk dari perjudian tersebut adalah perjanjian untung-untungan antar kedua belah pihak. Judi bola online di KUHP diatur pada pasal 303 dan pasal 303 bis yang berbunyi:

(1) *Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah).*

1. *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
2. *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya dengan sesuatu tata cara;*
3. *Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.*

(2) *Kalau yang bersalah, yang melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.*

(3) *Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada keuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih*



*atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.*

Sementara pasal 303 bis KUHP merumuskan sebagai berikut:

*(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:*

- 1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.*
- 2. Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah member ijin untuk mengadakan perjudian itu.*

*(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).*

Pada pasal 303 ayat (1) butir ke-1, yang dimaksud dengan “pencaharian” adalah bahwa pelaku memungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan berjudi dan kegiatan berjudi tersebut dijadikan suatu pekerjaan sehari-hari, sedang kata “perusahaan” bukan berarti perusahaan dalam arti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang melainkan cukup jika telah ada pengatur dan aturannya dalam bermain judi artinya dalam setiap permainan yang dimaksud dengan pasal 303 ayat (1) butir ke-1 KUHP adalah permainan yang terorganisir dengan rapi, dimana dalam permainan judi tersebut ada Bandar, agen, dan pemain judi. Pasal ini ditujukan kepada orang yang menyediakan tempat dan orang-orang yang terlibat dalam pengadaan atau penyelenggaraan perjudian tersebut misalnya penyedia tempat permainan judi, pegawai tempat perjudian, agen permainan judi, dan pemain judi. Pasal 303 ayat

(1) butir ke-1 dimaksudkan bahwa judi tersebut dilakukan di lingkungan terbatas.

Pasal 303 ayat (1) butir ke-2 yang dimaksud dengan “umum” yaitu telah turut bermain judi, sedangkan “turut campur berarti melibatkan diri dalam judi tersebut. Pada umumnya harus dibedakan antara berjudi dengan lotre, permainan ketangkasan dan bertaruh. Lotre diatur tersendiri di luar KUHP. Permainan ketangkasan, misalnya: bridge, domino tidak termasuk judi sedang bertaruh telah dirumuskan pada pasal 303 ayat (3) sebagai judi

Persepsi terhadap judi telah dirumuskan pada pasal 303 ayat (3). Unsur utama dari judi adalah “untung-untungan” ada juga yang menyebut “tergantung nasib”. Terhadap pertaruhan dirumuskan “semua pertaruhanyang tidak dilakukan antara mereka yang turut serta bermain. Pada ayat (2) memuat ancaman pidana pencabutan hak menjalankan pencarian, dalam hal perjudian dijadikan sebagai pencarian. Sementara ayat (3) memuat perihal pengertian *yuridis* perjudian.

Pada Pasal 303 bis KUHP perbuatan yang dilarang adalah melakukan perbuatan bermain judi namun demikian pada butir ke-1 tetap berdasarkan ketentuan Pasal 303. Pasal 303 bis dan Pasal 303 mempunyai kaitan karena pada Pasal 303 terkandung perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan, sedangkan Pasal 303 bis adanya perbuatan menggunakan kesempatan untuk bermain judi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melanggar Pasal 303 bis maka, didalamnya juga mengandung unsur melanggar Pasal 303.



Apabila Pasal 303 dan 303 bis dikaitkan dengan tindak pidana judi bola online para pemain judi bola hanya dapat dijerat dengan perbuatan judi yang telah dilakukan. Karena perbuatan yang dilakukan telah sesuai dengan Pasal 303 ayat (3), dimana ada peruntungan belaka. Padahal dalam judi bola online pelaku tidak hanya melakukan perbuatan perjudian saja, melainkan juga perbuatan kejahatan terhadap komputer karena menggunakan komputer melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Adami Chazawi terdapat Lima macam perjudian pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut.<sup>42</sup>

a. Bentuk Pertama

Tindak pidana yang melarang orang yang tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yang menjadikannya sebagai mata pencaharian atau pekerjaan. Apabila dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Melawan hukum: *tanpa ijin*
- 2) Kesalahan: *dengan sengaja*
- 3) Perbuatan:
  - a) Menawarkan kesempatan.
  - b) Memberikan kesempatan.
- 4) Objek : *bermain judi*
- 5) *Menjadikannya sebagai mata pencarian*

---

<sup>42</sup> Adami chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hal 58



Unsur sengaja diletakkan mendahului unsur perbuatan, objek yang sekaligus merupakan objek tindak pidana dan keadaan yang menyertai objek. Maka harus diartikan bahwa si pembuat menghendaki perbuatan menawarkan dan member kesempatan, dan secara sadar bahwa perbuatan tersebut dijadikan sebagai pencarian.

Kesadaran/pengetahuan terhadap keadaan tiadanya ijin, tidak perlu dimiliki si pembuat. Hal ini disebabkan unsur tanpa ijin diletakkan sebelum unsur sengaja dalam rumusan tindak pidana. Unsur sifat melawan hukum bersifat objektif. Sifat melawan hukumnya perbuatan terletak pada “tanpa ijin”. Cukup dibuktikan berdasarkan fakta/kenyataan, bahwa permainan judi yang dilakukannya tidak mempunyai ijin.

Arti menawarkan kesempatan bermain judi, adalah perbuatan dengan cara apapun untuk memmpengaruhi kehendak orang untuk bermain judi. Dapat disertai seperti menyediakan tempat dan waktunya, dan sebagainya. Sementara perbuatan memberikan kesempatan, adalah member peluang sebaik-baiknya dalam waktu yang cukup bisa disertai dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi.

Perbuatan semacam itu harus dijadikan sebagai pencarian.

Indikator dijadikannya sebagai pencarian adalah terjadi dalam waktu yang cukup lama, terjadi secara berulang atau terdapat

indikasi akan berulang,<sup>43</sup> dan mendapatkan hasil (uang) yang dapatnya digunakan untuk memenuhi keperluan hidupnya.

Sifatnya melawan hukum permainan judi terletak pada tiadanya ijin dari pemerintah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, unsur tanpa ijin ini menjadi tidak mempunyai arti lagi, menjadi tidak penting dan tidak perlu lagi dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP. Karena menurut PP tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak diperkenankan lagi memberikan ijin terhadap segala bentuk perjudian. Kecuali apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. Artinya harus tidak disertai dengan pertaruhan (uang). Jadi inti dari sifat perjudian dalam suatu perlombaan atau permainan terletak pada pertaruhannya, bukan pada permainan atau perlombaannya.

b. Bentuk Kedua

Bentuk kedua dirumuskan dalam pasal 303 ayat (1) butir ke-1. Tindak pidana yang melarang orang tanpa ijin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Jika dirinci, terdiri dari unsur-unsur

- 1) Melawan hukum : *tanpa ijin*
- 2) Kesalahan : *dengan sengaja*

---

<sup>43</sup> Satochid Kartanegaram(ii), Hukum Pidana II, hal 247

3) Perbuatan : *turut serta*

4) Objek : *suatu kegiatan usaha permainan judi*

Berdasarkan hubungan sengaja dengan unsur-unsur lainnya tersebut, maka sengaja disini harus diartikan, bahwa si pembuat menghendaki perbuatan menawarkan atau turut serta kegiatan usaha perjudian.

Untuk menggambarkan sifat tercela perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan bermain judi, digunakan tanpa ijin. Oleh sebab tiadanya ijin, maka perbuatan menawarkan bermain judi menjadi terlarang. Pada bentuk ketiga ini sifat melawan hukum bersifat objektif. Perbuatan turut serta (*deelnemen*) ada pada ketentuan ini. Perbuatan turut serta sendiri adalah bentuk turut serta terlibatnya secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>44</sup>

Perbuatan turut serta ada pasal 303 KUHP lebih luas dari pengertian turut serta pada pasal 55 KUHP. Pengertian turut serta dalam pasal 303 KUHP meliputi perbuatan pembuat pelaksana (*pleger*), pembuat penganjur (*uitlokker*) menurut pasal 55, maupun pembuat pembantu menurut pengertian pasal 56 KUHP.<sup>45</sup>

Pengertian turut serta dalam perjudian ini dalam pengertian luas, yang didasarkan ikut serta secara fisik, apapun wujudnya. Oleh karena itu arti turut serta dalam pasal 303 KUHP penyertaan dalam

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 73

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 162



bab V Buku I KUHP. Sementara syarat subjektif cukup adanya kesadaran dan kehendak untuk ikut serta dalam perjudian tersebut.

c. Bentuk Ketiga

Dirumuskan dalam pasal 303 ayat (1) butir ke-2. Tindak pidana yang melarang orang yang tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau unsur kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Jika dirinci maka terdiri dari unsur-unsur berikut ini:

1) Unsur Subjektif :

a) Kesalahan: *dengan sengaja*

2) Unsur-unsur objektif :

a) Melawan 66nsur : *tanpa hak*

b) Perbuatan :

1) *Menawarkan*

2) *Memberi kesempatan*

3) *Membuat dapat diakses*

c) Objek :

1) *Kepada khalayak umum untuk bermain judi.*

Untuk menggambarkan hubungan antara batin si pembuat dengan perbuatan, digunakan frasa “dengan sengaja” yang diletakkan pada permulaan kalimat rumusan. Dengan demikian mengandung arti, bahwa si pembuat menghendaki mewujudkan tindak pidana tersebut.

Unsur perbuatan bentuk ketiga sama dengan unsur perbuatan bentuk pertama. Perbedaannya terletak pada siapa perbuatan

tersebut ditujukan. Jika bentuk pertama tidak ditujukan secara tegas kepada siapa. Meskipun dapat disimpulkan mestinya ditujukan kepada orang lain. Orang lain tersebut adalah seseorang atau siapa pun juga. Tetapi menawarkan atau unsur kesempatan bermain judi pada bentuk ketiga secara tegas ditujukan pada khalayak umum. Sifat terbuka lebih nyata, meskipun sifat tersebut bukan merupakan hal penting, karena bukan menjadi unsur.

Frasa tanpa ijin disini merupakan unsur melawan hukum yang sifatnya objektif. Artinya pada kenyataannya permainan judi tersebut tidak ada ijin. Tidak penting tentang pengetahuan si pembuat, apakah Ia mengetahui ataukah tidak perihal kenyataannya tiadanya ijin. Hal ini disebabkan, karena tanpa ijin diletakkan sebelum unsur dengan sengaja dalam rumusan.

d. Bentuk keempat

Tindak pidana perjudian bentuk keempat pasal 303 ayat (1), melarang orang tanpa ijin *dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha/perusahaan perjudian*. Unsur-unsurnya adalah:

- 1) Melawan hukum : *tanpa ijin*,
- 2) Kesalahan : *dengan sengaja*;
- 3) Perbuatannya : *turut serta*;
- 4) *Dalam kegiatan usaha permainan judi*;

Kejahatan bentuk keempat ini, hamper sama dengan kejahatan bentuk kedua. Perbedaannya, perbuatan turut serta bentuk kedua adalah pada kegiatan usaha perjudian yang dijadikannya sebagai mata pencaharian, dan karena itu kesengajaannya juga ditujukan pada mata pencaharian itu.

Pada bentuk keempat, perbuatan turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian. Demikian juga kesengajaan pembuat dalam melakukan turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha. Kegiatan usaha perjudian disini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum. Kegiatan usaha perjudian harus tanpa ijin. Tiadanya ijin tersebut tidak perlu disadari si pembuat. Sifat melawan hukum disini murni bersifat objektif.

e. Bentuk kelima

Bentuk kelima mengenai delik perjudian (pasal 303 ayat (1) butir ke-3) ialah *melarang orang yang tanpa ijin melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi yang dijadikannya sebagai mata pencaharian*. Dengan demikian, kejahatan bentuk kelima terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Melawan hukum : *tanpa ijin*
- 2) Pebuatannya : *turut serta*
- 3) Objek : *dalam permainan judi*



#### 4) Sebagai mata pencaharian

Perbuatan materiil turut serta (*deelnemen*) terdapat pada kejahatan bentuk kedua, keempat dan kelima. Perbuatan turut serta telah diterangkan secara cukup. Dirasa tidak perlu diterangkan lagi.

Pada bentuk kelima ini, unsur dalam menjalankan kegiatan usaha tidak dimuat lagi, artinya si pembuat disini tidak ikut serta dalam menjalankan usaha mana adalah berupa perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan bermain judi. Pada bentuk kelima, si pembuat adalah ikut terlibat secara fisik bermain judi bersama orang lain yang bermain, dan bukan terlibat bersama pembuat yang melakukan kegiatan usaha perjudian yang orang ini tidak ikut bermain judi.

Si pembuat dalam bermain judi tanpa ijin haruslah dijadikannya sebagai mata pencaharian. Dari permainan judi ini si pembuat mendapatkan penghasilan yang untuk keperluan hidupnya. Menurut bentuk kelima, tidaklah dipidana apabila orang bermain judi hanya sebagai hiburan belaka.

Sedangkan menurut Adami Chazawi pada pasal 303 bis KUHP terdapat dua bentuk perjudian yaitu <sup>46</sup>:

##### 1. Bentuk pertama

Rumusan tindak pidananya sangat sederhana, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur :

##### a. Perbuatannya : *bernain judi*;

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 66

- b. *Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303.*

Pada Pasal 303 yang dijelaskan di atas terdapat dua bentuk perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan, yakni :

- a. *Pertama* : perbuatan menawarkan kesempatan dan memeberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian.
- b. *Kedua* : perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Dengan telah terjadinya tindak pidana pasal 303 yang dimaksudkan, maka terbuka kesempatan untuk bermain judi bagi siapa saja. Bagi siapa yang menggunakan kesempatan itu untuk bermain judi, maka dia telah melakukan tindak pidana menurut pasal 303 bis yang pertama. Jadi di dalam tindak pidana pasal 303 bis, terdapat unsur dari pasal 303 khususnya yang perbuatannya tersebut di atas.

Meskipun antara orang yang menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan bermain judi (pasal 303) terdapat hubungan yang erat dengan orang yang menggunakan kesempatan tersebut (pasal 303 bis). Namun antara orang yang menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan bermain judi dengan orang yang menggunakan kesempatan itu

bukanlah masuk ke dalam bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana dimaksud Pasal 55 dan 56 KUHP. Perbuatan mereka berdiri sendiri, dan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri pula.

## 2. Bentuk kedua

Pada bentuk kedua terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatannya : *ikut serta*;
- b. Objeknya : *bermain judi*;
- c. Tempatnya :
  - a. *Di jalan umum*;
  - b. *Di pinggir jalan umum*;
  - c. *Di tempat yang dapat dikunjungi umum*.
- d. Melawan hukum : *tanpa ijin dari penguasa yang berwenang*.

Pada tindak pidana bentuk kedua dan bentuk keempat pasal 303, perbuatan turut serta dalam menjalankan usaha menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan perjudian, yang artinya dia tidak ikut bermain judi. Namun pada tindak pidana bentuk kedua pasal 303 bis yang melakukan turut serta bermain judi adalah si pembuat sendiri.

Ikut serta bernain judi adalah ikut serta yang lain dari pasal 303. Pengertian perbuatan turut serta disini adalah pengertian turut serta (*medeplegen*) dalam arti sempit dari pasal 55 ayat (1) butir ke-1 KUHP. Dua orang melakukan tindak pidana



secara bersama-sama yang perbuatan mereka sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana. Ukurannya ialah tanpa ada dua orang yang perbuatannya sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana tidaklah mungkin tindak pidana itu dapat terwujud secara sempurna.

Apabila, dua orang bermain judi dijalanan umum, dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, maka kualitas dua orang itu adalah sama sebagai turut serta bermain judi. Tidak sama pengertiannya dengan dua orang yang turut serta (*medepleger*) menurut pasal 55 ayat (1) butir ke-1 dalam pengertian luas. Dalam arti luas dapat terjadi satu orang berkualitas sebagai pembuat peserta (*medepleger*), maka yang lain adalah pembuat pelaksana (*pleger*). Syarat orang yang turut serta (pembuat peserta) dalam pengertian luas harus memenuhi dua syarat *esensial*, yakni (1) kehendak pembuat peserta adalah sama dengan kehendak pembuat pelaksana dalam hal untuk mewujudkan tindak pidana, atau dengan kata lain kualitas batinnya sama dengan hal untuk terwujudnya tindak pidana, dan (2) wujud perbuatan apa yang diperbuat oleh peserta ini sedikit atau banyak member andil atau sumbangan terhadap terwujudnya tindak pidana.

Perjudian bentuk pertama tidak terdapat unsur “tanpa mendapat ijin”, karena menurut pasal 303 perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan

bermain judi itu sendiri memang tanpa ijin. Demikian pula orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut pasal 303, juga dengan sendirinya tanpa mendapat ijin.

Sementara perjudian bentuk kedua pasal 303 bis, disebutkan tanpa ijin, walaupun rumusannya dengan kalimat lain yakni kecuali kalau ada ijin. Sebab jika tidak ditambah unsur demikian, maka setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi pidana, dan ini tidak sesuai dengan konsepsi hukum perjudian dalam hukum pidana (KUHP), ialah hanya menjadi larangan apabila tanpa ijin. Sifat melawan hukumnya dari permainan judi itu adalah terletak pada tanpa mendapatkan ijin. Meskipun secara materiil bagi masyarakat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan masyarakat.

## 2. Ketentuan Dalam UU No. 11 tahun 2008

Tindak pidana perjudian juga diatur dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana perjudian pada UU ITE diatur pada Pasal 27 ayat (2).

*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*

Apabila rumusan tersebut di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

### a) Unsur subjektif

#### 1) dengan sengaja

b) Unsur-unsur objektif

1) *tanpa hak*

2) Pebuatan :

a)) *mendistribusikan; dan/atau*

b)) *mentransmisikan; dan/atau*

c)) *membuat dapat diaksesnya;*

c) Objek

1) *Informasi Elektronik; dan/atau*

2) *Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*

Unsur dengan sengaja merupakan unsur kesengajaan pelaku untuk melakukan perbuatan perjudian. Para pelaku judi bola online ada unsur kesengajaan untuk menggunakan komputer sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana judi dan menghindari polisi. Menurut pasal 27 ayat (2) UU ITE ini, pelaku mempunyai unsur kesengajaan untuk berbuat melawan hukum. Perbuatan melawan hukum pada pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya.

Sedangkan unsur objektifnya adalah “tanpa hak”. Tanpa hak mempunyai arti pelaku sebenarnya bukan seseorang yang berhak untuk melakukan perbuatan, yaitu mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya. Tidak berhaknya pelaku disebabkan pada KUHP disebutkan bahwa tindak pidana judi telah dilarang oleh pemerintah dan apabila ada haruslah mempunyai ijin dari pemerintah,



sehingga dapat disimpulkan hanya yang mempunyai ijin yang dapat melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya lebih tepat ditujukan selain kepada para pelaku judi bola online, juga dapat dikenakan kepada para pelaku yang membuat website yang menyediakan layanan untuk bermain judi. Perbuatan mendistribusikan sama saja dengan perbuatan mengirimkan informasi mengenai judi bola online kepada masyarakat. Perbuatan mentransmisikan adalah menyiarkan mengenai judi bola online, sedangkan dapat diaksesnya adalah sama dengan memberikan kesempatan untuk bermain judi bola online dengan membuka website judi bola online.

Tindak pidana judi yang diatur pada UU ITE merupakan *lex specialis* dari tindak pidana perjudian yang diatur pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Adapun syarat-syarat dari tindak pidana *lex specialis* yang dimaksud adalah :

1. Dalam tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*nya. Pada tindak pidana judi bola online *lex generalis*nya adalah perbuatan judi bola tersebut. Perbuatan judi bola yang terdapat pada uu no. 11 tahun 2008 harus memenuhi unsur perbuatan tindak pidana judi pada ketentuan KUHP. Sedangkan *lex specialis*nya adalah perbuatan judi bola

tersebut dilakukan dengan media komputer, sehingga perbuatan tersebut juga dapat diartikan sebagai kejahatan terhadap komputer (*cybercrime*).

2. Ruang lingkup tindak pidana *lex generalis* dan *lex specialis* harus sama. Pada ketentuan dalam KUHP dan uu no. 11 tahun 2008 kesamaan ruang lingkup tersebut adalah kesamaan pada tindak pidana perjudian.
3. Terdapat persamaan subjek hukum antara tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalis*nya orang maka subjek hukum *lex specialis*nya juga harus orang. Pada ketentuan KUHP dan uu no. 11 tahun 2008 sama subjek hukumnya adalah orang.
4. Terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Pada ketentuan KUHP secara jelas diatur objek tindak pidana tersebut adalah permainan judi sedangkan pada ketentuan UU ITE walaupun terdapat kejahatan terhadap komputer, namun di dalamnya terdapat unsur permainan judi.
5. Ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*nya.
6. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*nya.

### C. Perumusan Norma Tindak Pidana Judi Bola Online

Perumusan norma merupakan bagian terpenting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau legislasi. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Dalam perkembangannya, norma itu diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat, jadi inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.

Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan bahwa, kaedah adalah patokan atau ukuran maupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Apabila ditinjau bentuk hakekatnya, maka kaedah merupakan perumusan suatu pandangan (“*oedeeel*”) mengenai perilaku atau sikap tindak.<sup>47</sup>

Legislasi merupakan suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, peraturan perundang-undangan dapat dibuat antara lain oleh : pemerintah, rakyat, perwakilan rakyat, atau gabungannya.

Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, lembaga yang membentuk hukum perundang-undangan adalah lembaga legislatif baik yang berada di tingkat pusat (DPR) maupun yang ada di tingkat daerah (DPRD). Dalam pandangan sosiologis organ pembentuk undang-undang tidak sekedar dilihat hanya sebagai tempat dibuatnya suatu undang-undang melainkan merupakan tempat dimana bertemunya berbagai kepentingan dan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1989, hal 6



Berdasarkan pandangan tersebut maka organ pembentuk hukum mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo proses pembentukan hukum (legislasi) dapat dirinci menjadi tiga bagian, yaitu :<sup>48</sup>

- 1) Tahap inisiasi : muncul gagasan dalam masyarakat
- 2) Tahap sosio-politis : pematangan dan penajaman gagasan
- 3) Tahap Yuridis : penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan.

Pada tahap inisiasi muncul suatu gagasan dari masyarakat terhadap suatu terhadap suatu permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, dan mengehendaki adanya campur tangan pemerintah untuk menyelesaikan. Pada tahap inisiasi apabila dikaitkan dengan tindak pidana judi bola online dengan rumusan norma yang terdapat dalam masyarakat adalah adanya masyarakat yang beranggapan permainan judi merupakan perbuatan yang terlarang dan melanggar norma kesusilaan.

Menurut masyarakat judi adalah perbuatan yang dianggap bertentangan aturan-aturan hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat. Aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat biasa disebut norma. Norma yang cenderung hidup di masyarakat adalah norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama. Karena pada prinsipnya semua menolak dan melarang untuk bermain judi. Berdasarkan norma kesusilaan masyarakat menilai selain dilarang oleh agama perbuatan judi juga tidak mendatangkan manfaat, jika dibandingkan keuntungan yang didapat ketika memenangkan perjudian dampak buruknya lebih banyak.

---

<sup>48</sup> Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi*, In-Trans, Malang, 2008, hal 102

Mereka juga beranggapan bahwa judi tidak akan membuat mereka bertambah kaya. Judi juga merupakan awal dari kemerosotan mental yang menyebabkan seseorang dapat berbuat kriminal seperti pencurian, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. Demikianlah pandangan dari masyarakat mengenai perjudian dan kebanyakan masyarakat memang menolak adanya perbuatan judi.

Tahap selanjutnya yang dilalui dalam pembentukan perundang-undangan adalah tahap sosio-politis, pada tahap ini muncul pematangan dan penajaman gagasan yang muncul di masyarakat. Apabila gagasan yang muncul di masyarakat tersebut diterima oleh pembuat undang-undang maka akan dilanjutkan pada tahap yuridis.

Tahap yuridis merupakan tahap dimana gagasan yang muncul di masyarakat akan dirumuskan ke dalam rumusan hukum dan selanjutnya akan diundangkan. Pada tahap ini norma yang berlaku tidak lagi norma yang ada di masyarakat namun juga ada norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang dibentuk secara tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Norma hukum termasuk ke dalam sistem norma yang dinamik oleh karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuk atau menghapusnya, sehingga dalam sistem norma yang dinamik tidak dilihat dari segi isi norma tersebut, namun dilihat dari segi berlakunya atau pembentukannya. Norma hukum mempunyai sifat heteronom yaitu norma hukum datangnya dari luar diri seseorang.

### **1. Rumusan Norma Hukum Pada Ketentuan KUHP**

Norma hukum merupakan norma yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Norma hukum mempunyai sanksi yang diberikan



oleh orang yang melanggar di mana sanksi pidana tersebut dapat dilakukan oleh aparat negara. Pada tindak pidana judi bola online juga diatur pada ketentuan KUHP yaitu pada pasal 303.

Apabila suatu norma hukum itu dilihat dari segi alamat yang dituju (*addressat*), atau untuk siapa norma hukum itu ditujukan atau diperuntukkan dapat dibedakan antara norma hukum umum dan norma hukum individual, yang dalam penyebutannya biasa disebut subyek norma.<sup>49</sup>

Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak (*addressatnya*) umum dan tidak tertentu. Kata “umum” disini dapat berarti bahwa suatu peraturan itu ditujukan untuk semua orang, atau semua warganegara. Norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan (*addressatnya*) pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pasal 303 KUHP mengandung norma hukum umum, hal ini dapat dilihat pada kalimat “barang siapa” karena pada kata “barang siapa” mempunyai tujuan bahwa pasal 303 KUHP diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia hal ini sesuai dengan tujuannya bahwa norma hukum umum ditujukan kepada orang banyak (*addressatnya*) umum dan tidak tertentu.

Ditinjau dari norma hukum abstrak dan norma hukum konkret. Pasal 303 KUHP termasuk dalam norma hukum abstrak, karena norma hukum abstrak mempunyai pengertian bahwa suatu norma hukum yang

---

<sup>49</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal 26



melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Norma hukum abstrak ini merumuskan suatu perbuatan itu secara abstrak, yang pada pasal 303 KUHP disebutkan dengan kata : menawarkan dan memberi kesempatan. KUHP tidak menjelaskan secara konkret bagaimana yang dimaksud dengan menawarkan dan memberi kesempatan, namun demikian ketika seseorang sudah sesuai dengan perbuatan menawarkan dan member kesempatan maka orang itu sudah melanggar ketentuan pasal 303 KUHP. Sedangkan norma hukum konkret mempunyai arti bahwa suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata (konkret).

Berdasarkan dua penjelasan terkait dengan norma hukum umum dan norma hukum abstrak maka dapat dikombinasikan kedua norma tersebut yaitu norma hukum umum-abstrak yang pengertiannya adalah suatu norma hukum yang ditujukan umum dan perbuatannya masih bersifat abstrak.

Selain ditinjau dari segi *addresat* normanya dan hal yang diatur, norma hukum juga dapat dibedakan dari segi daya lakunya. Daya laku norma hukum dapat dibedakan antara norma hukum yang berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*) dan norma hukum yang berlaku sekali-selesai (*einmahlig*). Norma hukum yang berlaku terus menerus (*dauerhaftig*) adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Contoh norma hukum yang berlaku terus-menerus ini biasanya terdapat di dalam suatu

peraturan prundang-undangan, misalnya ketentuan yang mengatur agar seseorang itu tidak membunuh, atau setiap warganegara dilarang untuk mencuri, ini merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*).<sup>50</sup>

Norma hukum yang berlaku sekali-sekali (*einmahlig*) adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetapkan saja. Berdasarkan penjelasan mengenai daya berlakunya norma hukum, dapat disimpulkan bahwa pasal 303 KUHP termasuk dalam norma hukum yang berlaku terus-menerus. Karena peraturan perundang-undangan tersebut hanya berhenti apabila ada peraturan perundang-undangan yang menggantikannya.

Suatu norma hukum dapat merupakan suatu norma hukum tunggal dan dapat juga berwujud norma hukum yang berpasangan. Norma hukum tunggal adalah suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum yang lainnya, jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan (*das Sollen*) tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder.

Norma hukum primer adalah norma hukum yang berisi aturan/patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat. Norma hukum primer ini juga merupakan perintah (*das sollen*) dan biasanya dirumuskan dengan kalimat sebagai berikut :

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 68



- a) Hendaknya engkau tidak mencuri.
- b) Hendaknya engkau tidak menghilangkan nyawa orang lain.
- c) Hendaknya engkau tidak bermain judi.

Norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak dipenuhi, atau tidak dipatuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi, dan norma hukum sekunder ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak memenuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer.

Pada pasal 303 ayat (1) KUHP terkandung beberapa norma hukum primer karena pada pasal 303 ayat (1) terdapat 3 butir yaitu pada butir ke-1 norma hukum primernya adalah hendaknya seseorang tidak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau seseorang ikut serta perusahaan yang terkait dengan permainan judi. Sedangkan pada butir ke-2 terdapat norma hukum tunggal karena pada butir ke-2 hanya memberikan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa diikuti oleh norma hukum yang lainnya. Butir ke-3 terdapat bentuk norma hukum tunggal karena sama dengan pada bentuk butir ke-2 hanya berupa perintah saja tanpa diikuti oleh norma yang lain.

Pada pasal 303 ayat (2) merupakan bentuk norma hukum berpasangan. Norma hukum primernya adalah hendaknya seseorang tidak berbuat salah dengan bermain judi. Sedangkan norma hukum sekundernya adalah hendaknya seseorang yang berbuat salah melakukan



perbuatan judi tersebut dalam menjalankan pencariannya itu maka akan dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya.

Pada pasal 303 ayat (3) tidak terdapat norma hukumnya karena pada pasal 303 ayat (3) hanya berisi penjelasan dari perbuatan judi dan bentuk permainan yang seperti apakah yang dapat disebut permainan judi.

Sementara bentuk norma pada pasal 303 bis ayat (1) butir ke-1 KUHP adalah norma hukum umum-abstrak. Norma hukum umum, karena pada pasal 303 bis KUHP terdapat kalimat “barang siapa” yang ditujukan terhadap seluruh warga negara Indonesia, sedangkan dikatakan norma hukum abstrak terletak pada kalimat “kesempatan main judi”, karena mempunyai berbagai macam bentuk, sedangkan undang-undang tidak menjelaskan secara konkret. Sementara berdasarkan daya berlaku norma hukumnya pasal 303 bis KUHP termasuk ke dalam norma hukum yang berlaku secara terus-menerus karena sampai saat ini tidak peraturan perundang-undangan lainnya yang menggantikan pasal 303 bis KUHP.

Berdasarkan norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan. Pasal 303 bis KUHP merupakan norma hukum berpasangan karena terdapat norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Norma hukum primernya adalah hendaknya seseorang tidak melanggar pasal 303 KUHP dan tidak melakukan permainan judi di tempat umum, sementara norma hukum sekundernya adalah seseorang yang melanggar pasal 303 KUHP dan melakukan permainan judi di tempat umum akan

dihukum dengan kurungan paling lama empat tahun dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

## 2. Norma Hukum Terdapat Pada Ketentuan UU ITE

Tindak pidana perjudian juga diatur dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada UU ITE tindak pidana perjudian diatur pada pasal 27 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008, dimana disebutkan bahwa : *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”*

Berdasarkan alamat yang dituju (*addressat*), atau untuk siapa norma hukum itu ditujukan atau diperuntukkan, maka pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan norma hukum umum , karena pada pasal 27 ayat (2) UU ITE terdapat rumusan kalimat *“setiap orang”* yang menunjukkan pasal tersebut diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sementara dilihat dari hal yang diatur atau perbuatannya/tingkah lakunya, maka norma hukumnya adalah norma hukum abstrak karena pada pasal 27 ayat (2) UU ITE terdapat rumusan kalimat *“mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya”,* selain itu pada pasal 27 ayat (2) UU ITE norma hukumnya melihat pada perbuatan seseorang dengan tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret.

Berdasarkan rumusan norma di atas maka dapat dikombinasikan bahwa pasal 27 ayat (2) UU ITE terdapat norma hukum umum-abstrak, karena ditujukan untuk umum dan perbuatannya masih bersifat abstrak. Selain dari segi adresat norma dan hal yang diatur, apabila ditinjau dari segi daya berlakunya sudah dapat dipastikan bahwa terdapat norma hukum yang terus-menerus, karena sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menggantikan.

Dari penjelasan terkait dengan norma-norma hukum diatas yang membedakan antara norma hukum umum-individual, norma hukum abstrak-konkret, serta norma hukum yang berlaku sekali-selesai atau berlaku terus-menerus, maka norma hukum yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan adalah norma hukum yang bersifat umum-abstrak dan berlaku terus-menerus, sedangkan norma hukum yang bersifat individual-konkret, dan norma hukum sekali-selesai adalah merupakan suatu keputusan yang bersifat penetapan.

#### **D. Perumusan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Judi Bola Online**

Pada tahap yuridis selain dirumuskan mengenai norma yang terkandung dalam undang-undang juga dirumuskan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku judi bola online. Pembahasan mengenai perumusan sanksi pidana bagi pelaku judi online di atur dalam UU ITE, dan KUHP. Sistem sanksi pidana perjudian tetap mengacu pada aturan umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP .

Berkaitan dengan perumusan sanksi bagi pelaku tindak pidana judi bola online di Indonesia, sampai saat ini mayoritas pelaku tindak pidana judi bola online di Indonesia diadili dengan menggunakan ketentuan KUHP dan ketentuan



undang-undang di luar KUHP. Ketentuan dalam KUHP yang digunakan untuk mengadili pelaku judi bola online adalah pasal 303 dan 303 bis KUHP sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang digunakan untuk mengadili pelaku judi bola online adalah pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut teori pemidanaan yaitu teori absolute yang menyebutkan bahwa pemberian sanksi terhadap hanya berupa pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Pidana sama sekali tidak mengandung pertimbangan dan manfaat bagi terpidana. Pidana hanya dimaksudkan untuk memberikan nestapa guna member imbalan agar tercipta ketertiban hukum.<sup>51</sup> Dasar pijakan teori absolut dalam penjatuhan pidana adalah pada aspek pembalasan yang setimpal. Siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat apa saja yang timbul setelah penjatuhan pidana, baik terhadap terpidana maupun masyarakat. Faktor yang dipertimbangkan hanya masa lalu terpidana, tidak melihat masa depan terpidana. Tujuan pemidanaan adalah menjadikan si penjahat menderita, dengan jalan menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.

Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan selanjutnya, lahir teori relatif atau teori tujuan atau teori prevensi. Dalam teori relatif, tujuan pidana diarahkan pada usaha agar kejahatan yang telah dilakukan oleh penjahat tidak terulang lagi. Penjatuhan pidana bukan hanya memperhatikan masa lalu penjahat, melainkan juga masa depannya. Teori prevensi melihat pada sifat berbahanya pribadi si pelaku kejahatan, dan terhadap mereka yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan perbuatan jahat, karena itu dalam teori ini dikenal istilah prevensi

---

<sup>51</sup> Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cybercrime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, Hal 70

khusus dan prevensi umum. Teori-teori relatif, baik teori prevensi khusus dan prevensi umum, tidak memandang penjatuhan pidana sebagai suatu konsekuensi atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh seseorang pada masa lalu, melainkan untuk mencegah terulangnya kejahatan. Teori prevensi menganggap bahwa kesalahan seseorang berada di luar perhatiannya. Pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan di masa mendatang. Perbuatan manusia bukan menjadi dasar hukum atau alasan untuk menjatuhkan pidana, melainkan hanya dianggap sebagai keadaan yang menimbulkan reaksi berupa penjatuhan pidana.<sup>52</sup>

Selain teori absolut dan teori relatif, ada juga teori gabungan. Menurut teori gabungan, dalam konsepsi pidanaan perlu adanya pemilahan antara tahap-tahap pidanaan yang berbeda-beda, misalnya pada ancaman pidana di dalam undang-undang, proses penuntutan, proses peradilan, serta pelaksanaan pidana. Teori gabungan terdiri atas 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a) Teori gabungan menitik beratkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini tujuan pidanaan adalah mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- c) Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat,

<sup>52</sup> Ibid, hal 72

<sup>53</sup> Ibid, hal 76



memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat. Tujuan pidana bertalian erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.

### **1. Rumusan Sanksi Pidana Dalam KUHP**

Rumusan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana judi bola online, juga dapat dikenakan pada pasal 303 KUHP. Pada pasal 303 KUHP ini sanksi pidana telah digantikan berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1974 sanksi pidana untuk pelaku judi diubah menjadi 10 (sepuluh) tahun dan denda menjadi Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sebelum adanya perubahan sanksi ini, ketentuan dalam KUHP memberikan sanksi kepada pelaku judi yaitu paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah. Perubahan pada sanksi pidana pelaku judi ini menandakan bahwa pembuat undang-undang mulai menertiban penyelenggaraan judi yang banyak bermunculan di masyarakat.

Pembuat undang-undang menilai bahwa sanksi yang ada pada pasal 303 KUHP belum sesuai dengan tujuan pembedaan. Sanksi pidana sebelum adanya perubahan hanya memberikan hukuman pidana dua tahun delapan tahun dan denda sebesar Rp. 6.000, 00 (enam ribu rupiah) dianggap tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku judi. Pemberian pidana penjara kepada para pelaku judi bola online sesuai dengan pasal 10 KUHP, dimana terdapat dua jenis pidana hilang



kemerdekaan yaitu, pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku.

Pada tindak pidana judi bola online para pelaku dikenakan sanksi pidana penjara. Perbedaan penjara dengan pidana kurungan dapat dilihat pada jenis tindak pidana, pidana penjara dikenakan pada tindak pidana yang berat yaitu pada jenis kejahatan sedangkan kurungan diancamkan pada jenis pelanggaran. Judi bola online sendiri termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan karena muatan perjudian yang ada di dalamnya. Selain itu yang membedakan pidana penjara dengan pidana kurungan adalah lamanya masa pidana. Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 tahun) lebih tinggi daripada ancaman maksimum umum pidana kurungan (yakni 1 tahun).

Selain diancam dengan pidana penjara, para pelaku judi bola online yang dijerat dengan pasal 303 KUHP diancamkan juga pidana denda. Pidana denda yang diancamkan bagi para pelaku judi bola online sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (buku III KUHP) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.

Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok, keistimewaan itu adalah sebagai berikut :<sup>54</sup>

- 1) Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemidanaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya.
- 2) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, pasal 30 ayat 2).

Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda,

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 40

dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimal umum satu hari dan maksimal umum enam bulan.

- 3) Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu, maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.

Pada pidana denda apabila tidak dibayar, maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini dapat ditetapkan yang lamanya berkisar antara satu hari sampai enam bulan. Dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, batas waktu maksimum enam bulan ini dapat dilampaui sampai paling tinggi menjadi delapan bulan. Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akantetapi, bila kemudian terpidana membayar denda, ketika itu pula demi hukum terpidana harus dilepaskan dari kurungan penggantinya.

Pidana denda harus ada jaminan penggantinya, karena dalam pelaksanaan pidana denda tidak dapat dijalankan dengan paksaan secara



langsung seperti penyitaan atas barang-barang terpidana, dalam hal ini berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan dalam perkara perdata, yang dapat dilakukan dengan melelang barang-barang milik terdakwa setelah dilakukan penyitaan oleh pengadilan. Pasal 273 ayat 1 KUHP menentukan bahwa jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Sementara, pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut ayat 1 dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Uang denda yang dibayar terpidana menjadi milik negara (Pasal 42).

Selain pidana penjara dan pidana denda, para pelaku judi bola online juga diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Hal ini, sesuai dengan Pasal 303 ayat 2 KUHP yang disebutkan bahwa : *“kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya itu.”*

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-undang hanya memberikan kepada Negara wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah :<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 44

- 1) Hak memegang jabatan umum atau jabatan yang tertentu.
- 2) Hak menjalankan jabatan Angkatan Bersenjata/TNI.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampuy, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anaka sendiri.
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian.

Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Pasal 38 menentukan tentang lamanya waktu bila hakim menjatuhkan juga pidana pencabutan hak-hak tertentu, yaitu sebagai berikut :<sup>56</sup>

- 1) Bila pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada yang bersangkutan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu berlaku seumur hidup.
- 2) Jika pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak-hak

<sup>56</sup> *Ibid*, hal 45

tertentu itu maksimum lima tahun dan minimum dua tahun lebih lama daripada pidana pokoknya.

- 3) Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah berupa pidana denda, maka pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

Namun ada yang perlu diperhatikan bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan di atas apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Mata pencaharian atau pekerjaan (*beroep*) adalah tiap usaha swasta untuk memperoleh penghasilan. Tidak dipersoalkan penghasilan itu apakah untuk diri sendiri ataukah untuk orang lain, apakah merupakan pekerjaan pokok ataukah pekerjaan sampingan. Pekerjaan atau mata pencaharian tidak meliputi jabatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 35 ayat 1, di mana hak menjabat dapat dicabut untuk semua jabatan yang dipangku seseorang. Akan tetapi, undang-undang melarang untuk mencabut hak menjalankan untuk semua pekerjaan, melainkan hanya pekerjaan tertentu saja karena jika undang-undang memperkenankan untuk mencabut semua pekerjaan, maka yang bersangkutan dan termasuk keluarganya akan menjadi terlantar, dan ini tidak sesuai dengan tujuan pembedaan.

Sementara pada Pasal 303 bis KUHP, para pelaku judi bola online diancam pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp.



10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ancaman pidana pada Pasal 303 bis lebih berat daripada Pasal 303, karena perbuatan yang terdapat dalam Pasal 303 bis juga sangat termasuk melanggar Pasal 303 KUHP selain itu ditambahkan pula ikut serta bermain judi yang diadakan di jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum. Perbuatan turut serta dalam bermain judi pada Pasal 303 bis dilakukan sendiri oleh si pembuat sendiri. Jadi pelaku selain menawarkan permainan judi pada khalayak umum juga ikut terlibat dalam permainan judi tersebut. Perbuatan pelaku tersebut sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) butir ke-1 mengenai penyertaan.

Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan sama lain, demikian juga tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain.<sup>57</sup>

Menurut MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Perbuatan turut berbuat ialah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana. Sebagai contoh dalam tindak

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal 73

pidana perjudian, apabila ada dua pihak yang tertangkap tangan sedang bermain judi di suatu tempat, maka kedua pelaku judi tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Selain itu permainan judi juga tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja, namun harus ada pihak lain yang ikut bermain.

Terdapat dua pandangan mengenai perbuatan turut serta, yaitu perbuatan turut serta melakukan dalam arti sempit dan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dalam arti luas. Pandangan yang sempit ini dianut oleh Van Hamel Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan seperti ini lebih condong pada ajaran objektif.

Sedangkan bagi pandangan luas tentang pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan, kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya.

## 2. Rumusan Sanksi Pidana Menurut Ketentuan UU ITE

Pada UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemberian sanksi tindak pidana judi bola online diatur pada Pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa : *“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun*

*dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."*

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE terdapat perbedaan mengenai sanksi bagi pelaku judi bola online. Pada ketentuan UU ITE pelaku judi bola online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Perbedaan sanksi pidana penjara dan denda dengan KUHP disebabkan pada ketentuan UU ITE selain dikenakan unsur tindak pidana perjudian, juga dikenakan unsur kejahatan terhadap komputer. Karena para pelaku menggunakan komputer dalam melakukan permainan judi bola.

Perbedaan sanksi pidana antara ketentuan KUHP dengan ketentuan UU ITE masih belum dapat memberantas tindak pidana judi bola online. Bahkan sanksi pidana penjara yang lebih berat sekalipun masih belum dapat membuat para pelaku judi bola online menjadi jera dan berhenti untuk bermain judi bola. Mayoritas para pelaku yang ditangkap oleh polisi adalah para pelaku lama yang sebelumnya juga pernah ditangkap polisi untuk tindak pidana perjudian, namun demikian mereka tidak jera dan ketika keluar dari penjara tetap mengulang perbuatan berjudi.<sup>58</sup>

Tidak jeranya para pelaku judi bola online dan malah mengulangi lagi perbuatan judi menandakan belum efektifnya pidana penjara bagi pelaku judi bola online. Menurut Barda Nawawi Arief, efektifitas pidana

---

<sup>58</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ipda Agung Ari Bowo anggota Polda Jatim, (8 Juni 2012)



penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan masyarakat.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, criteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan.

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

Aspek pertama (*deterrent aspect*), biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan indikator inilah RM. Jackson menyatakan bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.<sup>59</sup>

Aspek kedua yaitu aspek perbaikan (*reformative aspect*), berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana, masih merupakan masalah yang belum dapat terselasaikan. Hal ini disebabkan adanya beberapa problem metodologis yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan, mengenai:

- a) Apakah ukuran menentukan telah adanya tanda-tanda perbaikan atau adanya perubahan sikap pada diri si pelaku.
- b) Berapa lamanya periode tertentu untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara.

Berdasarkan metodologis di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pemberian sanksi pidana penjara terhadap para pelaku judi bola online belum memberikan efek jera terhadap pelaku judi bola online. Tertangkapnya pelaku tindak pidana judi bola online justru malah membuat pelaku berhati-hati ketika bermain judi bola setelah keluar dari penjara.

---

<sup>59</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2009, hal 83

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai kebijakan legislasi terhadap tindak pidana judi bola online menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Ketentuan perundang-undangan mengatur tindak pidana judi bola online adalah ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP; Pasal 303 bis KUHP. Sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku judi bola online adalah Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 27 ayat (2), dengan ancaman sanksi pidana sesuai pada ketentuan Pasal 45 ayat (1). Pada ketentuan KUHP pelaku judi bola online hanya dapat dikenakan perbuatan judi. Sedangkan pada UU ITE selain memenuhi unsur perjudian sesuai dengan ketentuan KUHP pelaku judi bola online juga dijerat perbuatan kejahatan terhadap komputer.
2. Norma yang terkandung pada pembentukan undang-undang (legislasi) adalah norma yang ada pada masyarakat yaitu, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. hukum umum-abstrak karena sifatnya untuk seluruh warga negara Indonesia dan melihat perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya. Selain norma hukum umum-abstrak, pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjudian juga terdapat norma hukum terus



menerus karena sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan lain yang menggantikan. Sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku judi bola online menurut ketentuan Pasal 303 KUHP adalah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), dan Pasal 303 bis KUHP mengancam pelaku judi bola online dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku judi bola online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan bagi pembaca sekalian dalam kaitannya dengan tindak pidana judi bola online :

1. Hendaknya kepolisian dalam menerapkan ketentuan bagi pelaku tindak pidana dunia maya pada umumnya, ataupun judi bola online pada khususnya selalu mengacu pada ketentuan UU ITE. Hal ini disebabkan oleh asas *lex specialis derogat lex generalis*, dimana UU ITE merupakan kekhususan dari KUHP. Dengan acuan pada UU ITE, diharapkan tindak pidana dunia maya pada umumnya, ataupun judi bola online pada khususnya dapat lebih diminimalkan, mengingat sanksi yang ada pada UU ITE lebih berat daripada yang terdapat pada KUHP.

2. Hendaknya pemberian sanksi pidana pada pelaku judi bola online berdasarkan dengan teori pemidanaan yaitu teori gabungan sehingga tidak hanya memberikan sanksi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku namun juga ada upaya untuk mencegah pelaku judi kembali memainkan judi bola online .



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Renadja Karya, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, Ferdian, Ardi, 2011, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang.

Dirjosisworo, Soedjono, 1937, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, P.T Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1984, *Sosio-Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung.

Darmawan, Mohammad Kemal, 1994, *Startegi Pencegahan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Farida Indrati, Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Ibrahim, Anis, 2008, *Legislasi Dan Demokrasi*, In-Trans Publishing, Malang.

Kansil, C.S,T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

M Arief Mansur, Didik & Gultom, Elisatris, 2005, *Cyber Law*, PT Refika Aditama, Bandung.

Muladi, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung.



Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra

Aditya Bakti, Bandung.

Wahid, Abdul & Labib, Muhammad, 2005, *Kejahatan Mayatantra*, PT Refika

Aditama, Bandung.

Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama,

Yogyakarta.

Wisnubroto, AI, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan*

*Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

#### UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### INTERNET

Aji Dedi Mulawarman, 2008, Pengertian Teknologi (online), <http://ajidedim.wordpress.com/teknologi-islami/technology/>, (3 Februari 2012).

*Penyelenggara Jasa Internet* (online), [http://id.wikipedia.org/wiki/Penyelenggara\\_jasa\\_internet](http://id.wikipedia.org/wiki/Penyelenggara_jasa_internet), (3 Februari 2012).

Andrik Supriadi, 2010, *Hati-Hati Kejahatan Internet* (online), <http://andriksupriadi.wordpress.com/2010/04/29/cyber-crime/>, (7 Februari 2012).